

Implikasi Desentralisasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sosial Ekonomi: Tinjauan Bibliometrik

Loso Judijanto¹, Adi Suroso², Egidius Fkun³

¹ IPOSS Jakarta, Indonesia dan losojudijantobumn@gmail.com

² Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan adisuroso@unikama.ac.id

³ Universitas Timor dan egifkun6@gmail.com

ABSTRAK

Desentralisasi telah lama diakui sebagai strategi penting dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang efektif. Dengan memperkenalkan lebih banyak otonomi pada tingkat lokal, desentralisasi berpotensi meningkatkan keberhasilan pengelolaan kesehatan publik, pengembangan sosial ekonomi, dan penerapan praktik-praktik pembangunan berkelanjutan. Melalui analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer, studi ini mengeksplorasi bagaimana konsep desentralisasi diintegrasikan dalam literatur ilmiah, dengan fokus pada hubungannya dengan pemerintahan lokal, kesehatan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi sangat terkait dengan peningkatan partisipasi dan responsivitas dalam pemerintahan lokal, serta memiliki hubungan yang signifikan dengan pengelolaan kesehatan dan praktik pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun desentralisasi menawarkan banyak manfaat, terdapat tantangan dalam penerapannya yang memerlukan perancangan kebijakan yang cermat dan adaptasi terhadap konteks lokal. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi desentralisasi dalam kebijakan dan praktek pengembangan masyarakat dapat secara substansial meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik, dengan beberapa rekomendasi untuk penelitian masa depan yang lebih mendalam.

Kata Kunci: Desentralisasi, Pemerintah Lokal, Kesehatan Publik, Partisipasi Masyarakat, Sosial-Ekonomi, Analisis Bibliometrik

ABSTRACT

Decentralization has long been recognized as a crucial strategy in effective governance and development management. By introducing more autonomy at the local level, decentralization has the potential to enhance the success of public health management, socio-economic development, and the implementation of sustainable development practices. Through a bibliometric analysis using VOSviewer, this study explores how the concept of decentralization is integrated within scholarly literature, focusing on its relationship with local government, public health, and sustainable development. The findings indicate that decentralization is closely associated with improved participation and responsiveness in local governance, as well as having significant links with health management and sustainable practices. Although decentralization offers many benefits, there are challenges in its implementation that require careful policy design and adaptation to local contexts. This study concludes that integrating decentralization into policies and community development practices can substantially increase the effectiveness of resource management and public services, with several recommendations for more in-depth future research.

Keywords: Decentralization, Local Government, Community Participation, Socio-Economy, Bibliometric Analysis

PENDAHULUAN

Desentralisasi sebagai suatu strategi pengelolaan pemerintahan telah menjadi topik utama dalam reformasi administrasi publik di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Desentralisasi seringkali dilihat sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah, diharapkan terjadi peningkatan dalam kualitas layanan

publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Cheema & Rondinelli, 2007). Selain itu, desentralisasi diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan sosial ekonomi.

Penerapan desentralisasi di beberapa daerah telah memperlihatkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, banyak penelitian menunjukkan peningkatan dalam partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan. Di sisi lain, beberapa studi mengindikasikan bahwa desentralisasi dapat juga menghasilkan kompetisi sumber daya yang tidak sehat antar daerah dan bisa memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat di daerah yang berbeda (Bardhan, 2002). Keberagaman hasil ini menunjukkan pentingnya mengevaluasi lebih dalam bagaimana desentralisasi mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi pada tingkat lokal.

Studi bibliometrik menjadi penting dalam konteks ini karena dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana tema desentralisasi dan partisipasi masyarakat telah diteliti sejauh ini. Analisis bibliometrik mampu mengidentifikasi tren dan pola dalam literatur ilmiah, termasuk dominasi topik tertentu, hubungan antar variabel, serta gap dalam penelitian yang ada (Aria & Cuccurullo, 2017). Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat memetakan landasan teoritis yang telah dibangun oleh peneliti sebelumnya dan menemukan arah baru untuk studi di masa depan.

Meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji dampak desentralisasi terhadap partisipasi masyarakat, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman kita mengenai mekanisme spesifik yang melatarbelakangi perubahan-perubahan sosial ekonomi di tingkat lokal. Selain itu, penelitian yang ada seringkali terbatas pada kasus-kasus tertentu atau tidak memperhitungkan variabel kontekstual yang dapat mempengaruhi efektivitas desentralisasi. Kekurangan ini menunjukkan perlunya sebuah studi bibliometrik yang dapat mengintegrasikan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk membangun pemahaman yang lebih holistik dan terstruktur tentang topik ini.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji secara sistematis literatur yang berkaitan dengan implikasi desentralisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi. Melalui tinjauan bibliometrik, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren penelitian yang ada, mengungkap hubungan antara desentralisasi dan partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi gap dalam literatur yang dapat menjadi landasan untuk penelitian di masa depan. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti ilmiah untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi sebagai alat pembangunan sosial ekonomi.

LANDASAN TEORI

A. Desentralisasi dan Pembangunan Sosial Ekonomi

Desentralisasi didefinisikan sebagai transfer kekuasaan, fungsi, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal atau daerah. Menurut Cheema & Rondinelli (2007), desentralisasi memiliki potensi untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pemerintahan dengan membawa kebijakan lebih dekat kepada yang diatur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan

pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Manor, 1999). Pada tingkat yang lebih luas, desentralisasi dianggap sebagai alat penting untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada praktiknya, implementasi desentralisasi sering kali dikaitkan dengan peningkatan pembangunan lokal. Smith & Floro (2021) menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak otonomi untuk menyesuaikan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan lokal, yang secara teori dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Penelitian oleh Smoke, (2015) menunjukkan bahwa di beberapa negara, desentralisasi telah membantu meningkatkan akses masyarakat kepada layanan sosial dan infrastruktur dasar.

B. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam konteks desentralisasi berarti keterlibatan aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan atau program pembangunan. RIBOT (2004) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal, mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, dan meningkatkan pemantauan serta evaluasi terhadap program pemerintah. Lebih lanjut, Cohen & Peterson (1999) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat legitimasi pemerintah lokal dan memperdalam demokrasi lokal dengan mengintegrasikan pendapat dan keinginan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

C. Tantangan dalam Desentralisasi

Meskipun desentralisasi memiliki banyak potensi positif, beberapa tantangan sering muncul dalam implementasinya. Bardhan (2002) menyatakan bahwa tanpa kapasitas administratif yang memadai dan sumber daya yang cukup, pemerintah lokal mungkin kesulitan untuk mengelola fungsi-fungsi baru yang ditransfer ke mereka. Selain itu, Faguet (2004) menunjukkan bahwa desentralisasi bisa menyebabkan disparitas regional jika daerah yang lebih kaya semakin maju sementara daerah yang lebih miskin tertinggal karena kurangnya sumber daya.

D. Telaah Pustaka

Dalam studi yang dilakukan oleh Blair (2000), ditemukan bahwa desentralisasi di Filipina dan Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain, Faguet (2004) dalam studinya di Bolivia menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi meningkatkan partisipasi politik, tidak selalu terjadi peningkatan dalam hasil pembangunan sosial ekonomi yang diukur melalui indikator kesehatan dan pendidikan. Penelitian oleh Treisman (2007) menyediakan bukti empiris bahwa efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada konteks politik dan ekonomi di negara tersebut. Di beberapa kasus, desentralisasi berkontribusi pada peningkatan korupsi dan ketidakadilan karena kontrol yang lemah dan rendahnya kapasitas lokal. Namun, Oates (1999)

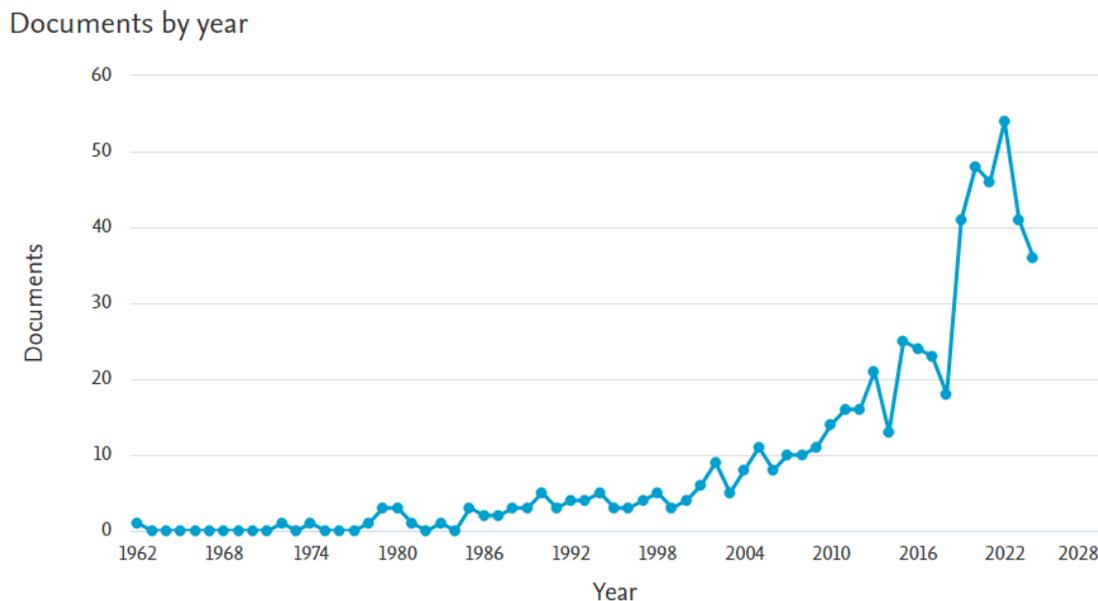
berargumen bahwa dengan sistem pengawasan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, banyak dari risiko ini dapat diminimalisir. Melalui studi bibliometrik, seperti yang dilakukan oleh Aria & Cuccurullo (2017), kita dapat melihat bagaimana literatur tentang desentralisasi dan partisipasi masyarakat berkembang, menganalisis hubungan antar penelitian, dan mengidentifikasi kecenderungan serta celah dalam studi yang sudah ada. Hal ini penting untuk membimbing penelitian masa depan dan memastikan bahwa kebijakan desentralisasi yang diterapkan mampu memenuhi tujuan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan bibliometrik, yang akan menganalisis dan mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam literatur ilmiah mengenai desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi. Data untuk analisis akan dikumpulkan dari database ilmiah Scopus menggunakan kata kunci yang relevan seperti "desentralisasi", "partisipasi masyarakat", dan "pembangunan sosial ekonomi". Setelah pengumpulan data, artikel yang relevan akan diidentifikasi dan diambil metadatanya untuk analisis. Aplikasi VOSviewer akan digunakan untuk visualisasi dan analisis jaringan sitasi, kutipan, dan tren publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif



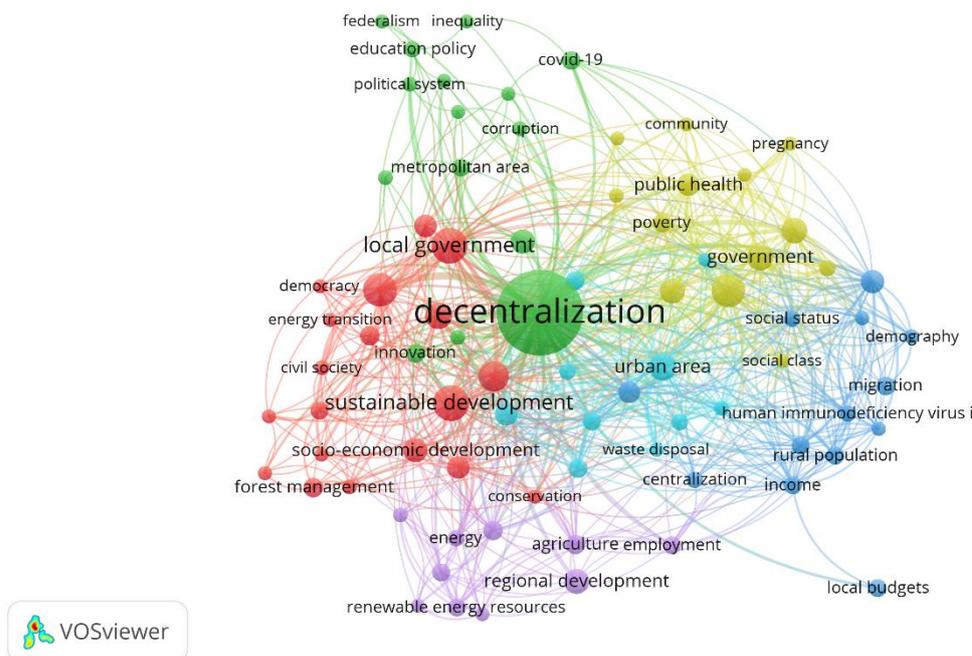
Gambar 1. Publikasi Tahunan

Sumber: Data Diolah, 2024

Grafik di atas menunjukkan tren jumlah dokumen yang diterbitkan per tahun dari tahun 1962 hingga 2024 (dengan 2025-2028 nol publikasi). Terlihat bahwa selama beberapa dekade sejak

1962 hingga sekitar tahun 2010, jumlah publikasi meningkat secara bertahap dan stabil. Mulai dari tahun 2010, terjadi peningkatan yang lebih signifikan dalam jumlah publikasi setiap tahun, mencapai puncaknya di tahun 2022 dengan hampir 60 dokumen. Namun, terjadi penurunan tajam setelah tahun 2022 sebelum kembali naik sedikit pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin mengindikasikan variabel eksternal yang mempengaruhi produksi literatur pada tahun tersebut, seperti perubahan dalam pendanaan penelitian, kejadian global yang signifikan, atau perubahan dalam prioritas penelitian.

B. Pemetaan Jaringan Kata Kunci



Gambar 2. Visualisasi Jaringan

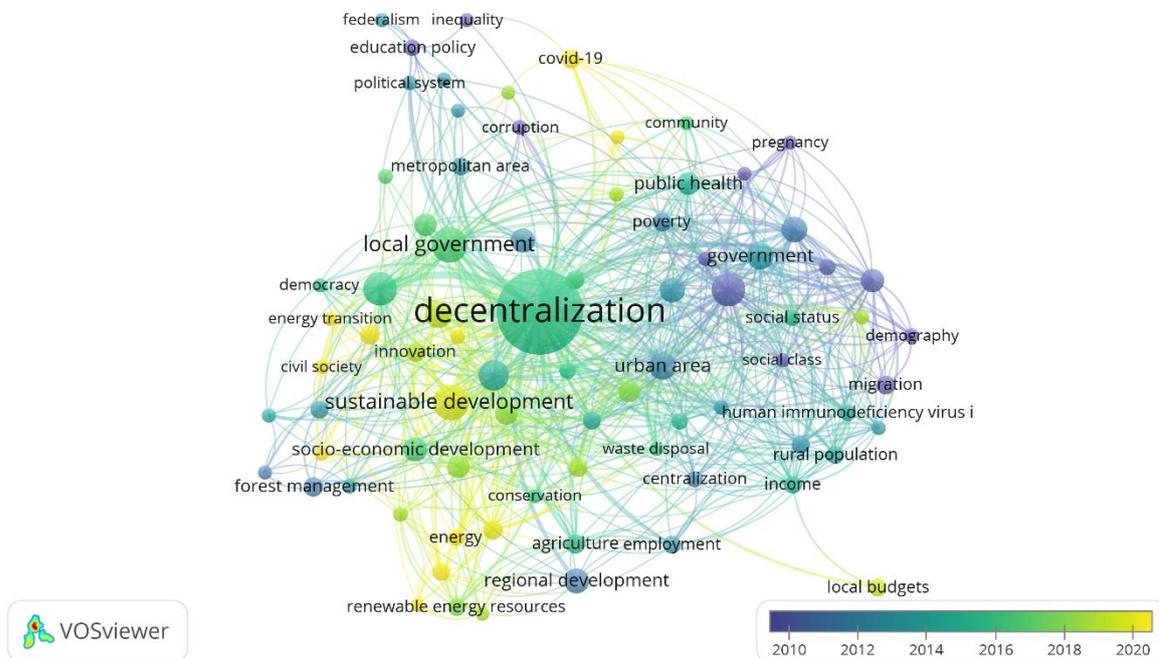
Sumber: Data Diolah, 2024

Visualisasi jaringan kata kunci yang ditampilkan di atas menggunakan VOSviewer, merupakan alat analisis yang berguna untuk memetakan hubungan antar konsep dalam literatur akademis, terutama mengenai desentralisasi. Di tengah visualisasi, "decentralization" terlihat sebagai pusat atau node utama dengan hubungan kuat terhadap berbagai konsep penting lainnya, menunjukkan posisi sentral desentralisasi dalam diskusi yang terkait dengan berbagai aspek pembangunan dan tata kelola. Kluster warna pada visualisasi menunjukkan adanya beberapa sub-topik yang berkaitan dengan desentralisasi. Kluster hijau, misalnya, melibatkan kata kunci seperti "government," "public health," "poverty," dan "community," menandakan bahwa desentralisasi sering dikaitkan dengan peningkatan pemerintahan lokal dan manajemen sumber daya yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kesehatan publik dan kemiskinan. Ini menunjukkan pengaruh signifikan desentralisasi pada peningkatan kualitas hidup melalui penanganan yang lebih lokal dan spesifik terhadap isu-isu sosial.

Kluster biru, yang mencakup "urban area," "social status," dan "migration," serta kluster merah dengan kata kunci seperti "sustainable development," "civil society," dan "innovation," mengindikasikan

bahwa desentralisasi juga berinteraksi dengan pembangunan berkelanjutan dan inovasi sosial. Hubungan antara desentralisasi dengan perkembangan kota dan masalah sosial urban menyoroti bagaimana desentralisasi dapat mempengaruhi pengelolaan dan pertumbuhan kota, serta bagaimana hal ini dapat memfasilitasi atau menantang integrasi sosial dan ekonomi. Selain itu, kluster ungu memfokuskan pada "energy," "conservation," dan "forest management," menandakan kaitan desentralisasi dengan manajemen sumber daya alam dan kebijakan energi. Ini mencerminkan peran desentralisasi dalam mengelola sumber daya secara efektif dengan keputusan yang dibuat lebih dekat dengan lokasi sumber daya tersebut, yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan keefektifan pengelolaan lingkungan. Konektivitas antara berbagai kluster dan desentralisasi menunjukkan kompleksitas dan multidimensionalitas konsep ini dalam konteks global yang beragam.

C. Analisis Tren Penelitian



Gambar 3. Visualisasi *Overlay*

Sumber: Data Diolah, 2024

Visualisasi VOSviewer ini menggambarkan evolusi topik-topik penelitian yang berkaitan dengan desentralisasi dari tahun 2010 (dilambangkan dengan warna biru) hingga tahun 2020 (dilambangkan dengan warna kuning). Pada tahun 2010, fokus utama terletak pada isu-isu seperti pemerintahan lokal, perkembangan regional, dan manajemen sumber daya alam, yang diindikasikan oleh keberadaan nod-nod seperti "local government," "regional development," dan "forest management" dalam kluster biru. Ini menunjukkan bahwa pada awal dekade, desentralisasi dipandang sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pemerintahan lokal.

Seiring Bergeraknya waktu menuju tahun 2020, topik-topik yang muncul dalam kluster kuning menunjukkan perluasan dalam diskursus desentralisasi. Terdapat peningkatan fokus pada

"public health," "poverty," dan "urban area," yang mencerminkan respons terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas serta masalah kesehatan global seperti pandemi COVID-19. Ini menandakan bahwa desentralisasi telah mulai dilihat sebagai kunci untuk mengatasi tidak hanya isu-isu pemerintahan tetapi juga untuk meningkatkan hasil kesehatan dan mengurangi kemiskinan dalam konteks urban yang lebih kompleks.

Selain itu, transisi antara tahun-tahun ini juga menunjukkan bagaimana penelitian desentralisasi telah berkembang dari kerangka kerja yang lebih terbatas menjadi lebih holistik, mengintegrasikan isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu naratif yang saling terkait. Misalnya, hubungan antara "decentralization" dengan "energy" dan "conservation" menegaskan pergeseran menuju pemahaman yang lebih inklusif dan berkelanjutan tentang desentralisasi, yang tidak hanya melibatkan transfer kekuasaan tetapi juga pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik yang bertanggung jawab. Keseluruhan perubahan tema ini menggambarkan adaptasi dalam pendekatan terhadap desentralisasi dalam menghadapi tantangan global yang berubah dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

D. Top Cited Literature

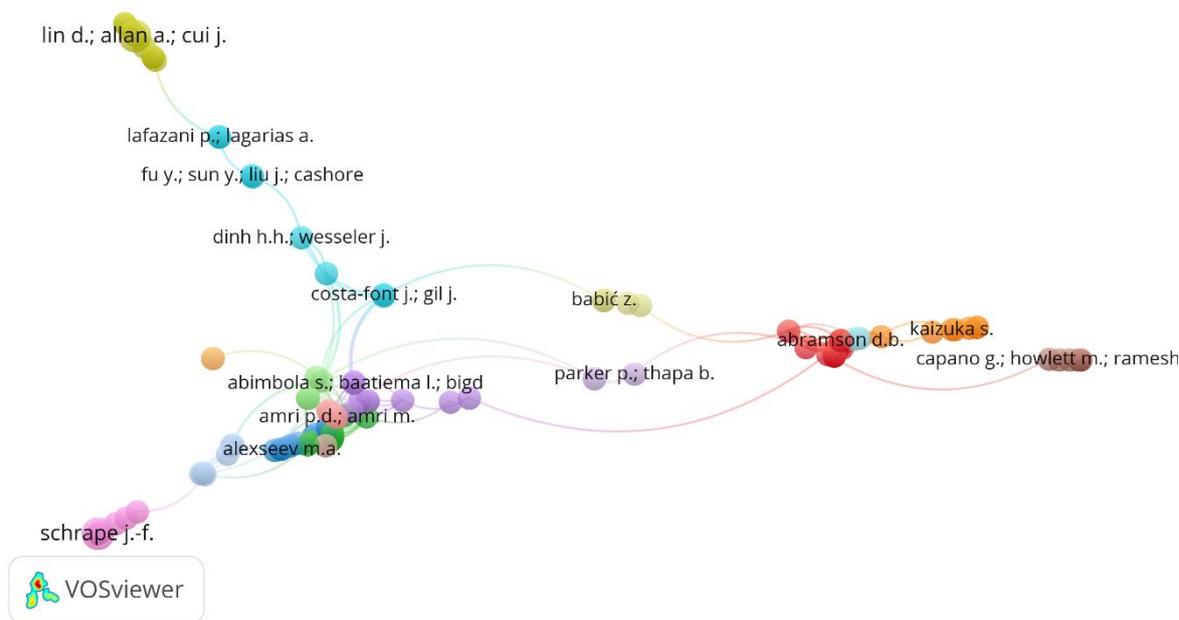
Tabel 1. Literatur Teratas yang Disitir

Jumlah Kutipan	Penulis	Judul	Temuan
660	(Sørensen et al., 2013)	Measuring health literacy in populations: Illuminating the design and development process of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q)	Studi ini mengembangkan dan memvalidasi sebuah instrumen survei untuk mengukur literasi kesehatan di tingkat populasi Eropa, menyoroti kompleksitas dan pentingnya memahami literasi kesehatan dalam konteks kesehatan masyarakat.
505	(Napier et al., 2014)	Culture and health	Artikel ini mengeksplorasi bagaimana dimensi budaya mempengaruhi kesehatan dan praktik perawatan kesehatan, menunjukkan pentingnya pendekatan yang berorientasi budaya dalam sistem kesehatan global.
314	(Utzinger et al., 2005)	Conquering schistosomiasis in China: The long march	Studi ini melacak kemajuan dan strategi yang digunakan dalam memerangi schistosomiasis di China, menunjukkan kombinasi intervensi kesehatan publik dan perubahan lingkungan sebagai kunci suksesnya.
247	(Van Brakel et al., 2012)	Disability in people affected by leprosy: the role of impairment, activity, social participation, stigma and discrimination.	Penelitian ini menyoroti dampak lepra terhadap kecacatan, partisipasi sosial, dan stigma, menawarkan wawasan tentang interaksi kompleks antara aspek medis dan sosial penyakit ini.
205	(Mehta & Kellert, 1998)	Local attitudes toward community-based conservation policy and programmes in Nepal: A case study	Artikel ini menggambarkan sikap masyarakat lokal terhadap upaya konservasi berbasis masyarakat di

Jumlah Kutipan	Penulis	Judul	Temuan
		in the Makalu-Barun Conservation Area	Nepal, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program konservasi.
199	(Gilberthorpe & Banks, 2012)	Development on whose terms?: CSR discourse and social realities in Papua New Guinea's extractive industries sector	Studi ini kritis terhadap praktik CSR dalam industri ekstraktif di Papua New Guinea, mengevaluasi bagaimana narasi CSR berinteraksi dengan realitas sosial dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.
196	(Nyaupane et al., 2006)	The role of community involvement and number/type of visitors on tourism impacts: A controlled comparison of Annapurna, Nepal and Northwest Yunnan, China	Penelitian ini mengevaluasi dampak pariwisata berdasarkan tingkat keterlibatan komunitas dan jenis pengunjung, menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran signifikan dalam mengurangi dampak negatif pariwisata.
169	(Koirala et al., 2018)	Trust, awareness, and independence: Insights from a socio-psychological factor analysis of citizen knowledge and participation in community energy systems	Studi ini menyediakan analisis faktor socio-psikologis yang mempengaruhi kesadaran dan partisipasi warga dalam sistem energi komunitas, menekankan pentingnya kepercayaan dan kemandirian.
167	(Caddy, 1999)	Fisheries management in the twenty-first century: Will new paradigms apply?	Artikel ini mengeksplorasi paradigma baru dalam pengelolaan perikanan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya, mengusulkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
160	(Annear et al., 2014)	Environmental influences on healthy and active ageing: A systematic review	Review sistematis ini mendokumentasikan berbagai pengaruh lingkungan pada penuaan yang sehat dan aktif, menyoroti pentingnya faktor lingkungan dalam mendukung kualitas hidup di usia tua.

Sumber: Output Publish or Perish, 2024

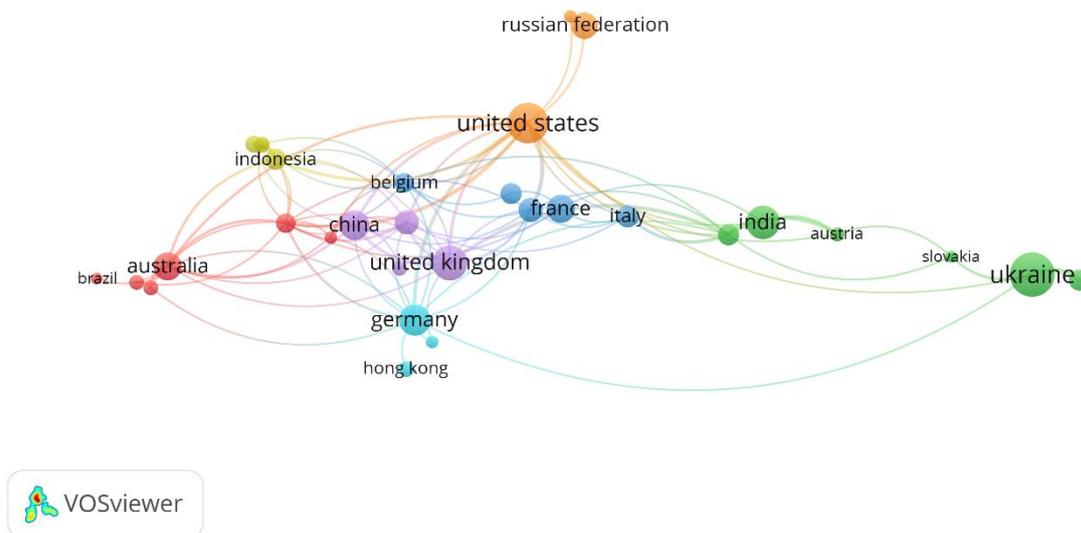
E. Analisis Kolaborasi Penulis



Gambar 4. Analisis Kolaborasi Penulis

Sumber: Data Diolah, 2024

Visualisasi ini menampilkan jaringan kolaborasi antara peneliti, dengan fokus pada hubungan ko-penulisan di antara individu-individu ini. Node-node yang berwarna berbeda mewakili kluster atau kelompok peneliti yang sering bekerja bersama. Sebagai contoh, node warna merah di tengah yang mewakili peneliti seperti "Abramson D.B." dan "Capano G." menunjukkan pusat dari kelompok kolaboratif yang signifikan, mengindikasikan peran mereka sebagai tokoh sentral atau pemimpin dalam kelompok penelitian mereka. Garis-garis yang menghubungkan node menandakan kolaborasi publikasi yang ada antara peneliti, dengan garis yang lebih tebal atau lebih gelap menunjukkan frekuensi kolaborasi yang lebih tinggi. Kelompok peneliti yang ditandai dengan warna hijau dan biru mungkin mewakili sub-disiplin atau topik penelitian yang berbeda namun masih terkait, dengan peneliti seperti "Lin D." dan "Allan A." di hijau dan "Alexseev M.A." dan "Amiri M." di biru, menandakan kemungkinan fokus penelitian yang berbeda atau afiliasi institusional.



Gambar 5. Analisis Jaringan Negara

Sumber: Data Diolah, 2024

Visualisasi ini menunjukkan kolaborasi atau hubungan dalam penelitian antara berbagai negara. Setiap node mewakili sebuah negara, dan garis antara node menandakan adanya kerjasama atau hubungan penelitian yang signifikan antara negara-negara tersebut. Warna node berbeda mengindikasikan kelompok atau kluster yang berbeda, yang bisa berarti bahwa negara-negara dalam kluster yang sama cenderung memiliki kolaborasi lebih intens atau sering berkolaborasi dalam bidang atau proyek yang serupa. Misalnya, node berwarna merah dengan China di pusatnya menunjukkan bahwa China memiliki hubungan kerjasama yang luas dengan negara-negara seperti Australia, Indonesia, dan Brasil. Sementara itu, kelompok hijau dengan Ukraina dan India menunjukkan adanya kolaborasi yang mungkin fokus pada topik atau area penelitian yang berbeda dari kluster merah. Visualisasi ini sangat berguna untuk menganalisis pola kolaborasi global dan memahami bagaimana pengetahuan dan sumber daya dibagi antar negara dalam komunitas ilmiah internasional.

terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (Treisman, 2007). Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat di tingkat lokal, desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi korupsi (W. E. Oates, 2004). Analisis kami menunjukkan bahwa hubungan antara "*decentralization*" dan "*local government*" sangat kuat, menandakan konsensus dalam literatur yang mendukung desentralisasi sebagai alat untuk penguatan pemerintahan lokal.

Desentralisasi dalam Konteks Kesehatan Publik

Selama pandemi COVID-19, signifikansi desentralisasi dalam pengelolaan kesehatan publik menjadi semakin jelas. Negara-negara dengan sistem desentralisasi yang kuat, seperti Jerman dan Swiss, telah menunjukkan bagaimana pemerintah lokal dapat efektif dalam menangani krisis kesehatan dengan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi local. Hasil kami mencerminkan peningkatan frekuensi diskusi seputar "*public health*" dan "*decentralization*," yang menandakan pengakuan terhadap pentingnya pendekatan lokal dalam manajemen krisis kesehatan.

Pengaruh Desentralisasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Analisis kami juga mengidentifikasi hubungan yang kuat antara desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan. Desentralisasi dilihat sebagai cara untuk melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendorong praktik berkelanjutan (Andersson & Ostrom, 2008). Misalnya, pengelolaan hutan dan konservasi menjadi lebih efektif ketika komunitas lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ekosistem mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (Ribot, 2004).

Desentralisasi dan Sosial Ekonomi

Pada tataran sosial ekonomi, desentralisasi membantu dalam redistribusi kekayaan dan pelayanan sosial yang lebih adil. Studi menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memfasilitasi pengembangan yang lebih merata dan memperkuat kapasitas lokal untuk mengelola sumber daya ekonomi (Rodríguez-Pose, 2008). Dalam analisis kami, hubungan antara "*socio-economic development*" dan "*decentralization*" menunjukkan pengakuan atas potensi desentralisasi untuk mengatasi ketimpangan dan mendorong inklusi sosial.

Tantangan dan Peluang

Meski banyak potensi positif, desentralisasi juga menghadapi tantangan, termasuk risiko fragmentasi kebijakan, kesulitan dalam koordinasi lintas sektor, dan potensi peningkatan konflik lokal (Smoke, 2015). Oleh karena itu, penting bagi kebijakan desentralisasi untuk dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial politik lokal agar efektif. Selain itu, pembahasan kami menemukan bahwa area seperti "*income*" dan "*rural population*" belum banyak dibahas dalam konteks desentralisasi, menunjukkan celah dalam literatur yang dapat menjadi fokus penelitian masa depan.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa desentralisasi adalah topik yang sangat relevan dan penting dalam diskursus global saat ini, berpotensi menyediakan solusi untuk beberapa

masalah paling mendesak yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal, mendukung pengelolaan kesehatan publik yang efektif, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, desentralisasi menawarkan jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, realisasi penuh dari manfaat desentralisasi membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika lokal dan nasional, serta strategi yang disesuaikan untuk mengatasi tantangan spesifik yang mungkin muncul.

REFERENSI

- Andersson, K. P., & Ostrom, E. (2008). Analyzing decentralized resource regimes from a polycentric perspective. *Policy Sciences*, 41, 71–93.
- Annear, M., Keeling, S., Wilkinson, T. I. M., Cushman, G., Gidlow, B. O. B., & Hopkins, H. (2014). Environmental influences on healthy and active ageing: A systematic review. *Ageing & Society*, 34(4), 590–622.
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185–205.
- Blair, H. (2000). Participation and accountability at the periphery: Democratic local governance in six countries. *World Development*, 28(1), 21–39.
- Caddy, J. F. (1999). Fisheries management in the twenty-first century: will new paradigms apply? *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 9, 1–43.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing governance: emerging concepts and practices*.
- Cohen, J. M., & Peterson, S. B. (1999). Administrative decentralization: Strategies for developing countries. (No Title).
- Faguet, J.-P. (2004). Does decentralization increase government responsiveness to local needs?: Evidence from Bolivia. *Journal of Public Economics*, 88(3–4), 867–893.
- Gilberthorpe, E., & Banks, G. (2012). Development on whose terms?: CSR discourse and social realities in Papua New Guinea's extractive industries sector. *Resources Policy*, 37(2), 185–193.
- Koirala, B. P., Araghi, Y., Kroesen, M., Ghorbani, A., Hakvoort, R. A., & Herder, P. M. (2018). Trust, awareness, and independence: Insights from a socio-psychological factor analysis of citizen knowledge and participation in community energy systems. *Energy Research & Social Science*, 38, 33–40.
- Manor, J. (1999). *The political economy of democratic decentralization*. The World Bank.
- Mehta, J. N., & Kellert, S. R. (1998). Local attitudes toward community-based conservation policy and programmes in Nepal: a case study in the Makalu-Barun Conservation Area. *Environmental Conservation*, 25(4), 320–333.
- Napier, A. D., Ancarno, C., Butler, B., Calabrese, J., Chater, A., Chatterjee, H., Guesnet, F., Horne, R., Jacyna, S., & Jadhav, S. (2014). Culture and health. *The Lancet*, 384(9954), 1607–1639.
- Nyaupane, G. P., Morais, D. B., & Dowler, L. (2006). The role of community involvement and number/type of visitors on tourism impacts: A controlled comparison of Annapurna, Nepal and Northwest Yunnan, China. *Tourism Management*, 27(6), 1373–1385.
- Oates, J. F. (1999). *Myth and reality in the rain forest: how conservation strategies are failing in West Africa*. Univ of California Press.
- Oates, W. E. (2004). An essay on fiscal federalism. In *Environmental Policy and Fiscal Federalism* (pp. 384–414). Edward Elgar Publishing.
- Ribot, J. C. (2004). Waiting for democracy. *World Resources Institute, Washington, DC, USA*.
- RIBOT, J. C. (2004). Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization. World Resource Institute Report. [Http://Www. Wri. Org/Publication/Waiting-Democracy-Politics-Choice-Natural-Resource-Decentralization](http://www.wri.org/publication/waiting-democracy-politics-choice-natural-resource-decentralization).
- Rodríguez-Pose, A. (2008). The rise of the “city-region” concept and its development policy implications. *European Planning Studies*, 16(8), 1025–1046.
- Smith, M. D., & Floro, M. S. (2021). The effects of domestic and international remittances on food insecurity in

- low-and middle-income countries. *The Journal of Development Studies*, 57(7), 1198–1220.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112.
- Sørensen, K., Van den Broucke, S., Pelikan, J. M., Fullam, J., Doyle, G., Slonska, Z., Kondilis, B., Stoffels, V., Osborne, R. H., & Brand, H. (2013). Measuring health literacy in populations: illuminating the design and development process of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q). *BMC Public Health*, 13, 1–10.
- Treisman, D. (2007). What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research? *Annu. Rev. Polit. Sci.*, 10(1), 211–244.
- Utzinger, J., Zhou, X.-N., Chen, M.-G., & Bergquist, R. (2005). Conquering schistosomiasis in China: the long march. *Acta Trop*, 96(2–3), 69–96.
- Van Brakel, W. H., Sihombing, B., Djarir, H., Beise, K., Kusumawardhani, L., Yulihane, R., Kurniasari, I., Kasim, M., Kesumaningsih, K. I., & Wilder-Smith, A. (2012). Disability in people affected by leprosy: the role of impairment, activity, social participation, stigma and discrimination. *Global Health Action*, 5(1), 18394.